



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/vnv92f33>

KONFLIK ETNIS DAN PROBLEMATIKA MULTIKULTURALISME: ANALISIS TRAGEDI SAMPIT TERHADAP IMPLEMENTASI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Aslan Noor^a, Bram Hasian Daniel Hutagalung^b, Dias Rahmah Aprilia^c, Keren
Winfry Theresia^d, Qolbiyatzahro^{e*}, Salsabila Putri Istainy^f

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; aslan.noor@fh.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi; 2510631030044@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi; 2510631030104@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^d Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi; 2510631030119@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^e Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi; 2510631030148@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^f Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi; 2510631030159@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

* Penulis Korespondensi: Qolbiyatzahro

ABSTRACT

The 2001 Sampit Tragedy stands as one of the bloodiest ethnic conflicts in Indonesian history, marking a profound erosion of the value of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity). This article aims to analyze the collapse of these pluralistic value, the correlation between structural inequality and the role of provocateurs, as well as post-conflict solutions grounded in local wisdom and Pancasila. This study employs a qualitative method with a library research approach, analyzing secondary data through sociological and anthropological perspectives. The findings reveal that the conflict between the Dayak and Madurese ethnic groups was not an isolated incident, but rather the culmination of latent tensions caused by the economic marginalization of indigenous communities, the failure of cultural acculturation, and the residual effects of the New Order's superficial security-oriented approach. The politicization of ethnic sentiment by provocateurs in the post-Reformasi era triggered an escalation of mass violence that claimed more than 500 lives and displaced approximately 100,000 residents. Post-conflict recovery was ultimately achieved through policy reconstruction and customary (adat) reconciliation. This study concludes that the management of diversity grounded in structural and legal justice is the primary key to safeguarding national integration.

Keywords: *Sampit; Bhinneka Tunggal Ika; Ethnic Conflict; Reconciliation; Pancasila*

Abstrak

Tragedi Sampit 2001 merupakan salah satu konflik etnis paling berdarah dalam sejarah Indonesia yang menandai runtuhnya nilai Bhinneka Tunggal Ika. Artikel ini bertujuan menganalisis runtuhnya nilai-nilai kemajemukan tersebut, keterkaitan ketimpangan struktural dengan peran provokator, serta solusi pascakonflik berbasis kearifan lokal dan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis data sekunder secara sosiologis dan antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura bukan peristiwa insidental, melainkan puncak ketegangan laten akibat marginalisasi ekonomi penduduk asli, kegagalan akulturasi budaya, dan dampak pendekatan keamanan era Orde Baru yang semu. Politisasi sentimen keetnis oleh provokator pasca-Reformasi memicu eskalasi kekerasan massal yang menewaskan

lebih dari 500 jiwa dan memaksa 100.000 warga mengungsi. Pemulihan pascakonflik berhasil dicapai melalui rekonstruksi kebijakan dan rekonsiliasi adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keberagaman yang berkeadilan secara struktural dan hukum adalah kunci utama menjaga integrasi nasional.

Kata Kunci: Sampit; Bhinneka Tunggal Ika; Konflik Etnis; Rekonsiliasi; Pancasila

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural yang berdiri di atas fondasi keberagaman luar biasa, lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah, dan keberagaman keyakinan yang hidup berdampingan di bawah satu atap kebangsaan [2]. Untuk mengikat semua perbedaan tersebut, para pendiri bangsa mewariskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika “berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang bersumber dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14. Semboyan ini bukan sekadar hiasan lambang negara, ia adalah janji kolektif bahwa perbedaan etnis, agama, ras, dan budaya dapat dirajut menjadi kekuatan nasional, bukan benih perpecahan.

Namun, janji itu memiliki harga yang harus dibayar dengan kerja nyata. Keberagaman yang tidak dikelola dengan keadilan dan rasa saling menghormati dapat dengan mudah berbalik menjadi sumber ketegangan. Ketimpangan ekonomi antardaerah, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas adalah kondisi-kondisi struktural yang secara diam-diam menggerogoti persatuan [2]. Di atas tanah yang retak itulah prasangka tumbuh subur, dan gesekan kecil antaretnis dapat berubah menjadi api menyala yang sulit dipadamkan.

Tragedi Sampit yang terjadi pada Februari 2001 bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari ketegangan laten yang telah terbangun selama puluhan tahun [9]. Konflik ini bermula sejak migrasi etnis Madura ke Kalimantan Tengah pada tahun 1930-an melalui program transmigrasi kolonial Belanda, yang berlangsung hingga era pemerintah Indonesia. Hingga tahun 2000, transmigran membentuk sekitar 21% populasi di provinsi tersebut. Selama beberapa dekade sebelum ledakan besar tahun 2001, tercatat sekitar 20 insiden yang melibatkan kedua etnis, termasuk kasus perkosaan dan pembunuhan di tahun 1972, 1982, 1996, dan 1997 [14]. Ketegangan ini diperkeruh oleh dominasi ekonomi pendatang di sektor-sektor strategis seperti perikanan dan penambangan [5]. Masyarakat Dayak merasa “tersingkirkan” di tanah mereka sendiri karena tingkat pendidikan yang rendah dan kebijakan pembangunan yang tidak menguntungkan mereka [1].

Puncak konflik terjadi pada 18 Februari 2001 di Sampit [14]. Terdapat beberapa versi mengenai pemicu utama konflik ini: serangan pembakaran terhadap sebuah rumah warga Dayak yang diduga dilakukan oleh etnis Madura, atau pertikaian akibat perjudian di desa Kereng Pangi pada Desember 2000 [14]. Masalah ini segera berkembang menjadi kerusuhan besar. Selama tiga hari awal, etnis Madura sempat menguasai Sampit, 2021. Namun, pada 20 Februari 2001, warga Dayak dari berbagai daerah datang memberikan bantuan dengan membawa senjata tradisional seperti mandau dan tombak. Kerusuhan segera meluas ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah, termasuk ibu kota Palangka raya [1]. Dalam situasi yang semakin memanas, etnis Dayak melakukan ritual adat seperti "Mangkuk Merah" untuk menggerakkan massa dan praktik "Ngayau" (perburuan kepala).

Tragedi Sampit meninggalkan luka kemanusiaan yang sulit terhapus. Catatan resmi menyebutkan sedikitnya 469 hingga lebih dari 500 orang tewas, dengan kisah paling mengerikan ketika ratusan warga Madura ditemukan dalam kondisi kepala terpenggal. Kekerasan itu memicu eksodus besar-besaran: sekitar 100.000 hingga 108.000 orang, mayoritas dari etnis Madura, terpaksa meninggalkan Kalimantan demi menyelamatkan diri. Di sisi lain, kerugian material juga tak kalah parah, lebih dari seribu rumah hangus terbakar, ratusan kendaraan hancur, dan fasilitas publik seperti sekolah serta perkantoran lumpuh total. Semua ini menjadikan tragedi tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka sosial yang membekas dalam ingatan bangsa. Pascakonflik, masyarakat Kalimantan Tengah berupaya menata kembali kehidupan sosial dengan membangun perdamaian melalui berbagai kesepakatan, Pascakonflik, masyarakat Kalimantan Tengah berusaha menata kembali kehidupan dengan membangun perdamaian melalui berbagai kesepakatan, salah satunya Pertemuan Batu pada tahun 2002. Di Sampit, Tugu Perdamaian didirikan sebagai simbol abadi penolakan terhadap pengulangan sejarah kelam tersebut [5]. Upaya rekonsiliasi juga diwujudkan dengan aturan bagi para pendatang yang ingin kembali, yakni menjunjung tinggi filosofi lokal seperti *Huma Betang* (kebersamaan) dan *Belom Bahadat* (hidup beradat), serta memegang teguh prinsip “di

mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.” [14]. Dengan cara ini, masyarakat berusaha meneguhkan kembali harmoni sosial dan memastikan tragedi serupa tidak terulang.

Tragedi Sampit harus dipahami bukan sekadar sebagai benturan fisik, melainkan sebuah benturan identitas yang kompleks. [5], konflik ini mencerminkan kegagalan akulturasi budaya, di mana terdapat persepsi bahwa etnis pendatang kurang menghargai adat istiadat masyarakat lokal. [1], menyatakan secara sosiologis, ini adalah bentuk "Aspirational Deprivation", di mana rasa frustrasi warga asli Dayak terhadap marginalisasi politik dan ekonomi meledak menjadi agresi terhadap kelompok etnis lain yang dianggap sebagai simbol ancaman terhadap identitas dan ruang hidup mereka. Hilangnya nilai-nilai kesetaraan dan toleransi yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika selama krisis ini menunjukkan betapa rapuhnya integrasi nasional ketika keberagaman tidak dikelola dengan keadilan sosial [14].

Ketika penumpahan darah terjadi di tanah sendiri, integrasi nasional berada di ambang kehancurannya yang paling nyata. Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam tiga hal pokok: pertama, bagaimana proses runtuhnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika berlangsung dalam konteks Tragedi Sampit; kedua, bagaimana perpaduan antara ketimpangan sosial-budaya struktural dan peran provokator menjadi pemicu ledakan konflik; serta ketiga, solusi berbasis nilai-nilai Pancasila.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan menelaah juga menganalisis sumber-sumber bahan pustaka yang tersedia berasal dari riset terdahulu [3]. Penulis menetapkan cakupan topik dan menyeleksi bahan pustaka yang diperoleh. Bahan pustaka yang digunakan berasal dari jurnal online, artikel, serta buku yang di dapatkan secara online. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode ini dipilih untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis informasi secara mendalam mengenai variabel perbedaan sosiokultural dan peran provokator dalam Tragedi Sampit 2001. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks sejarah, dokumen kebijakan. Data dipilah, dikritisi, dan dihubungkan secara kausal untuk menggambarkan bagaimana perbedaan tingkah laku budaya dan intervensi provokator dapat mengakibatkan dekonstruksi terhadap esensi nilai *Bhinneka Tunggal Ika*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Filosofis Bhinneka Tunggal Ika

“Bhinneka Tunggal Ika” merupakan sebuah semboyan yang tertera dalam Kitab Sutasoma karya sang pujangga Kerajaan Majapahit, Mpu Tantular. Semboyan ini pada masanya merupakan bentuk toleransi keagamaan antara umat Hindu dan Buddha [10]. Kemudian semboyan ini resmi ditetapkan sebagai lambang negara sebagaimana dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. “Bhinneka Tunggal Ika” berarti “yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu” atau “beranekaragam namun satu jua”. Di bidang sosial, keberagaman itu tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. Selain itu, keanekaragaman juga dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan sebagainya.

Dalam kehidupan berbangsa, terdapat tiga pilar nilai utama yang terkandung di dalamnya, yaitu toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Toleransi adalah kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan keyakinan dan latar belakang kultural tanpa memaksakan kehendak dominan. Persatuan adalah kesadaran rasional-emosional untuk meleburkan berbagai ego sektoral dan primordial demi mempertahankan keutuhan integrasi nasional. Penghargaan terhadap perbedaan adalah sikap yang memandang kemajemukan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas kodrati dan kekayaan kolektif. Konsep ini merumuskan sebuah harmoni yang tegas antara pluralisme dan kesatuan [10].

Meskipun nilai-nilai luhur tersebut telah disepakati sebagai fondasi bernegara, realitas sejarah menunjukkan adanya jurang pemisah (*gap*) yang besar antara tataran ideal dan implementasi di akar rumput. Salah satu potret kelam kegagalan internalisasi nilai-nilai ini adalah meletusnya Perang Sampit pada Februari 2001 di Kalimantan Tengah, sebuah konflik komunal berdarah antara etnis Dayak asli dan warga migran etnis Madura [8].

Kegagalan implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika di Sampit ditandai oleh beberapa kondisi: Pertama, pemberangusan Nilai Kemanusiaan: Konflik ini mereduksi esensi sila kemanusiaan dan persatuan, karena perbedaan identitas etnis dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan massal, pemenggalan kepala (tradisi mangkok merah), pembakaran ribuan rumah, hingga pengusiran etnis secara massal [7]; Kedamaian semu Era Orde Baru: Perselisihan antara kedua etnis sebenarnya telah berulang kali terjadi selama masa Orde Baru. Namun, pemerintah kala itu cenderung meredam konflik menggunakan pendekatan keamanan (security approach) yang bersifat represif-formal, sehingga ketegangan diredam secara semu. Ketika keran kebebasan terbuka di era Reformasi, akumulasi kekecewaan dan kegagalan akulturasi tersebut meledak menjadi konflik terbuka yang tidak terkendali [7]; [8].

Selanjutnya, harmoni sosial di Sampit runtuh secara destruktif dapat dibedah melalui pendekatan sosiologis dan antropologis. Pertama, pendekatan Sosiologis (Teori Konflik Sosial dan Kecemburuan Ekonomi) Melalui lensa sosiologi, konflik Sampit dipicu oleh ketimpangan alokasi sumber daya material. Kehadiran etnis Madura melalui program transmigrasi dan migrasi swadaya berhasil mendominasi sektor ekonomi lokal, seperti perdagangan, transportasi, dan perikanan [8]. Berdasarkan Teori Konflik Sosial, dominasi ekonomi ini memicu kecemburuan sosial yang mendalam di kalangan masyarakat Dayak pribumi yang merasa terpinggirkan di tanah kelahiran mereka sendiri [7]. Konflik horizontal ini diperparah oleh persepsi bahwa aparat penegak hukum bertindak bias atau tidak adil dalam menangani kasus kriminal individual yang melibatkan oknum kedua etnis tersebut sebelum perang pecah. Kedua, pendekatan Antropologis (Perbedaan Budaya dan Hambatan Interaksi) Secara antropologis, runtuhnya harmoni bersumber dari perbedaan mendasar pada adat istiadat, nilai, dan norma sehari-hari yang gagal diintegrasikan melalui proses akulturasi yang sehat [8]. Konflik muncul karena adanya ketidakcocokan kultural (cultural incompatibility). Karakteristik etnis Madura yang dinilai sebagian masyarakat lokal cenderung kaku dalam beradaptasi dengan hukum adat setempat—serta kebiasaan membawa senjata tajam (celurit) di tempat umum—sering disalahtafsirkan sebagai bentuk provokasi atau ketidakdisiplinan sosial. Sebaliknya, prasangka buruk (prejudice) yang terakumulasi membuat stereotip negatif berkembang biak di kedua pihak, sehingga ketika terjadi pemicu kecil (insiden kriminalitas individu), masalah tersebut segera mengalami eskalasi menjadi konflik komunal atas nama martabat dan eksistensi etnis [8].

3.2. Faktor Penyebab Kehancuran Esensi Pancasila

Konflik ini berakar kuat pada dominasi ekonomi yang timpang di wilayah Kalimantan Tengah. Sejak kedatangan mereka melalui program transmigrasi, warga Madura dikenal memiliki etos kerja yang keras untuk bertahan hidup di perantauan, hingga akhirnya berhasil menguasai berbagai sektor komersial dan industri strategis seperti perikanan, penambangan, dan perkebunan [8]. Keberhasilan ini menciptakan kesenjangan sosial yang tajam dengan etnis Dayak selaku penduduk asli. Kemudian etnis Dayak juga menilai bahwa etnis Madura tidak bisa untuk diatur, dan tidak mengindahkan peraturan adat yang diatur oleh peraturan adat terutama keselarasan manusia dengan alam. etnis Dayak merasa semakin tersingkir dan teralienasi dari penguasaan sumber daya alam di tanah mereka sendiri [2]. Ketimpangan ekonomi yang menumpuk selama bertahun-tahun ini memicu kecemburuan sosial yang mendalam, membuka ruang yang sangat rentan sehingga terjadi pecahnya konflik terbuka ketika sistem pembagian keuntungan ekonomi daerah dinilai tidak adil bagi masyarakat adat.

Secara sosiologis, Tragedi Sampit memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya kajian budaya yang mendalam dalam kebijakan transmigrasi, di mana pemindahan penduduk secara massal tanpa pemetaan dampak jangka panjang dapat memicu gesekan akibat perbedaan nilai yang kontras. Konflik ini menjadi manifestasi dari kebuntuan komunikasi antarbudaya ketika warga pendatang berfokus pada akses ekonomi untuk bertahan hidup, sementara masyarakat asli Dayak mencemaskan hilangnya eksistensi mereka sebagai pribumi. Tanpa adanya pembekalan informasi mengenai adat istiadat setempat bagi warga pendatang serta lemahnya respons cepat dari penegak hukum di fase awal ketegangan, benturan paradigma ini dengan cepat melahirkan stereotip negatif dan prasangka dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketidakmampuan untuk saling memahami nilai budaya dan hukum adat lokal ini mempertegas jarak sosial di akar rumput, yang kemudian menjadi faktor utama meluasnya perpecahan antar-etnis saat terjadi insiden pemicu di lapangan [2].

Tragedi Sampit tahun 2001 bukanlah sebuah peristiwa insidental yang terjadi secara mendadak, melainkan puncak dari gunung es ketegangan yang telah bersemi sejak migrasi massal tahun 1930-an. Secara psikologis, ingatan kolektif kedua belah pihak diwarnai oleh rentetan gesekan. Karena konflik masa lalu tidak pernah diselesaikan secara tuntas hingga ke akar masalahnya oleh lembaga adat maupun hukum negara, hal tersebut menyisakan trauma sejarah dan dendam kolektif yang terpendam di dalam psikologis

masyarakat. Ketika terjadi pemantik kecil di lapangan, seperti aksi saling balas berupa pembakaran rumah-rumah warga Madura, dendam kolektif ini langsung teraktivasi dan meledak menjadi kemarahan massal yang sulit diredam dalam waktu singkat [8].

Ketegangan struktural, kultural, dan psikologis yang sudah matang di masyarakat kemudian dimanfaatkan secara sengaja oleh aktor intelektual dan elit lokal yang memiliki kepentingan perebutan pengaruh kekuasaan pasca-Reformasi. Fedlik Asser yang bekerja di Bappeda dan Lewis seorang pegawai Dinas Kehutanan terbukti secara hukum mendanai dan mengorganisasi massa di lapangan. Para provokator ini menggunakan pola manipulasi informasi dengan menyebarkan rumor-rumor palsu atau hoaks (seperti isu pembakaran tempat ibadah atau pembantaian sepihak) yang dirancang khusus untuk membakar amarah kedua belah pihak. Dengan menggoreng sentimen keetnisan yang chauvinistik secara masif, para provokator berhasil mengonversi gesekan antar-individu menjadi kerusuhan antaretnis berskala besar yang meluas dengan sangat cepat ke seluruh provinsi.

Kerusuhan massal terbuka akibat adanya insiden pemicu spesifik di lapangan yang tidak ditangani dengan cepat. Konflik ini meledak setelah terjadinya kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota etnis Dayak di sebuah klub malam lokal di Sampit. Sayangnya, aparat penegak hukum di daerah tersebut dinilai kurang gesit, lambat, dan tidak responsif dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut secara transparan [9]. Kelambanan polisi ini menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) yang mendalam dari masyarakat adat terhadap penegak hukum formal, yang pada akhirnya memicu kemarahan besar etnis Dayak.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memang merupakan wilayah konsentrasi terbanyak warga keturunan Madura di Kalimantan Tengah. Sebelum kerusuhan diperkirakan ada sekitar 75 ribu jiwa penduduk Madura di daerah itu. Di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kotim mereka mempunyai 4 orang wakil (1 PAN, 1 PPP dan 2 PKB). Mungkin karena besar jumlah warganya, sehingga merasa berpengaruh dan juga “menguasai” Sampit, ibukota Kotawaringin Timur. Begitulah ketika melakukan pawai keliling kota Sampit, 18-19 Februari 2001, mereka menunjukkan kekuatannya, dengan membawa senjata tajam (celurit) dan membawa spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Sampang II” [9]. Jadi orang Madura mendeklarasikan Sampit atau Kotawaringin Timur sebagai “Sampang II” (Sampang I tentunya yang ada di Pulau Madura). Mereka pun melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap warga masyarakat Dayak. Pembunuhan ini, menurut beberapa informan, sebagai pembalasan terhadap perlakuan yang sama yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura sebelumnya. Sebenarnya konflik antar kedua kelompok masyarakat tersebut serta berakibat adanya korban meninggal sudah seringkali terjadi. Rupanya terhadap konflik-konflik seperti itu dan beberapa lagi tindakan yang sejenis terjadi jauh sebelum tragedi Sampit 2001, pihak aparat keamanan dan penegak hukum tidak menerapkan tindakan hukum yang tegas. [4] Berbagai macam kendala dan masalah untuk melakukan solusi hukum yang terbaik dan adil, mulai dari alasan jumlah personil yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, juga ada sistem pemihakan dalam menangani persoalan konflik sosial dan sampai kepada indikasi penyudahan.

Kondisi sosiokultural yang rentan tersebut kian diperparah oleh faktor politik berupa lemahnya peran pemerintah serta kesalahan pendekatan penegakan hukum sejak era Orde Baru (1966–1998). Selama hampir tiga dekade, pemerintah menerapkan Pendekatan Keamanan (*Security Approach*) yang bersifat sangat superfisial demi menjaga ilusi stabilitas nasional. Setiap kali terjadi gesekan kecil atau perkelahian antaretnis, aparat hanya mendamaikan para pihak secara paksa melalui seremonial penandatanganan surat perjanjian di atas kertas tanpa pernah mau menyentuh akar masalah sengketa lahan atau ketimpangan ekonomi [4]. Langkah “menyapu sampah ke bawah karpet” ini berkelindan erat dengan kebijakan pembungkaman ekspresi politik era Soeharto yang melarang keras diskusi terbuka mengenai isu SARA. Akibatnya, masyarakat kehilangan “katup pengaman” (*safety valve*) untuk menyalurkan rasa frustrasi mereka. Ketika rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 dan cengkeraman militer melemah, ruang kebebasan yang mendadak terbuka lebar justru melepaskan seluruh trauma sejarah, kecurigaan, dan dendam kolektif yang selama puluhan tahun dipendam paksa. Hal inilah yang menjelaskan secara psikologis mengapa rentetan konflik komunal besar dengan mudah meledak beruntun di awal era Reformasi.

3.3. Dampak Kehancuran dari Tragedi Sampit

Tragedi Sampit yang memuncak pada Februari 2001 tetap tercatat sebagai salah satu konflik etnis paling berdarah dan kelam dalam sejarah modern Indonesia. Konflik yang melibatkan etnis Dayak asli dan warga transmigran etnis Madura ini tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga menorehkan dampak

kehancuran yang luar biasa masif di tanah Kalimantan Tengah. Dalam sekejap, kota Sampit yang semula hidup berubah menjadi arena mencekam yang dipenuhi kekerasan ekstrem, memicu kerugian kemanusiaan, sosial, hingga ekonomi yang membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk dipulihkan. [14].

Dampak paling memilukan dari tragedi ini adalah tingginya angka korban jiwa dan luka yang menyertainya. Berdasarkan catatan resmi, lebih dari 500 nyawa melayang dalam konflik tersebut, di mana banyak di antaranya tewas melalui aksi kekerasan yang sangat ekstrem di jalanan kota. Ketakutan yang mencekam ini kemudian memicu evakuasi massal terbesar di wilayah tersebut. Hampir 100.000 warga keturunan Madura terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri, dievakuasi menggunakan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut dan Pelnit menuju Jawa Timur dan Pulau Madura. Dalam hitungan hari, Sampit mengalami "pembersihan etnis" secara *de facto*, meninggalkan kota yang lumpuh dan kosong dari salah satu elemen penduduknya [6].

Secara fisik dan infrastruktur, Sampit hancur seperti kota mati pasca-perang. Ribuan bangunan, mulai dari rumah tinggal, ruko, fasilitas umum, hingga kendaraan milik warga dibakar dan dijarah oleh massa yang tidak terkendali. Kehancuran fisik ini secara otomatis melumpuhkan perekonomian daerah. Mengingat warga Madura saat itu memegang peranan dalam sektor informal, pasar, transportasi, dan buruh pelabuhan, kepergian mereka membuat roda dagang mandek total. Jalur distribusi logistik terputus, memicu kelangkaan barang pokok dan inflasi tinggi yang menyengsarakan sisa penduduk yang bertahan di kota tersebut.

Di luar kerugian materi dan nyawa, dampak yang paling sulit disembuhkan adalah kerusakan tatanan sosial dan trauma psikologis. Prasangka negatif, dan dendam antaretnis tertanam kuat, merusak toleransi yang telah dibangun lama di Kalimantan. Anak-anak dan keluarga yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut harus hidup berdampingan dengan gangguan stres pascatrauma yang mendalam. Dibutuhkan kerja keras lintas generasi, ketegasan hukum, serta rekonsiliasi adat yang sakral untuk akhirnya bisa mengembalikan Sampit menjadi kota yang damai, inklusif, dan harmonis seperti yang kita saksikan hari ini.

3.4. Upaya Rekonstruksi Pascakonflik dari Sisi Pemerintah dan Adat

Tragedi Sampit Dayak-Madura telah menimbulkan banyak kerugian materi maupun korban jiwa. Tragedi ini tidak hanya berdampak pada banyaknya kerusakan infrastruktur bangunan yang terdampak konflik di sebagian besar wilayah Kalimantan, namun juga menunjukkan betapa rusaknya hubungan etnis Dayak-Madura yang telah berakar dari rasa dendam dan ketidakadilan yang telah tertumpuk dalam masyarakat Dayak selama puluhan tahun. Dengan pecahnya konflik ini, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dan aparat negara dinilai telah gagal mencegah eskalasi potensi konflik antar etnis dari gejala-gejala gesekan antar etnis, khususnya etnis Dayak Madura karena setiap peristiwa dan insiden yang terjadi dari beberapa tahun ke belakang hanya diselesaikan di permukaan tanpa mencari titik inti permasalahannya. Hal ini terbukti dari metode penyelesaian konflik antar etnis yang diterapkan pemerintahan saat itu. Dalam pemerintahan Orde Baru, setiap konflik agama, ras, keetnisan dan konflik antargolongan dianggap dapat mengganggu proses pembangunan nasional, sehingga dilarang keras atau sangat tidak dianjurkan untuk berkonflik. Pada masa tersebut, aparat penegak hukum hanya menyelesaikan permasalahan yang ada dengan prosedur tertulis. Perwakilan dari tiap etnis akan dipanggil oleh aparat keamanan untuk mengikuti untuk bertemu langsung, menandatangani sebuah perjanjian tertulis yang berisi janji damai dan berfoto bersama sebagai bukti tuntasnya konflik ke pemerintah pusat. Namun, hal ini tidak menyelesaikan masalahnya, karena prosedur tersebut condong memaksa kedua etnis untuk berdamai agar menghindari ancaman dari pemerintah. [12] Selain itu, aparat hukum juga enggan mencari para pelaku tindak pemerkosaan atau pembunuhan yang sebenarnya dari tahun 70-80-an, karena takut memicu ricuh etnis, sebagaimana dijelaskan pada sub bab 'Faktor Penyebab Kehancuran Esensi Pancasila.' Pecahnya konflik ini juga didukung oleh masuknya Indonesia ke dalam era Reformasi pada tahun 1998 setelah lengsernya Soeharto dari bangku kepresidenan, sehingga masyarakat tiba-tiba mendapatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini mungkin mendorong etnis Dayak untuk membalaskan dendam mereka dengan menggunakan metode tradisional keetnisan, yaitu perang antar etnis. Selain itu, selama perpindahan era Orde Baru dan era Reformasi, kekuatan aparat penegak hukum menjadi sangat lemah [13]. Sehingga, etnis Dayak melihat kesempatan terbuka untuk membalaskan dendam mereka, dan memilih untuk menyerang, membunuh dan memenggal kepala orang-orang Madura, karena negara dianggap tidak adil dalam menyikapi masalah ini. Pemerintah pusat sudah melakukan intervensi dalam konflik ini dengan mengirim ratusan aparat TNI dan Polri untuk meredakan konflik dan menangkap tersangka-tersangka provokator, tapi konflik masih kunjung berlanjut, sehingga pada 2 Maret 2001, TNI turun tangan untuk mengevakuasi lebih dari 100.000 warga Madura ke Jawa Timur supaya tidak dimusnahkan oleh etnis Dayak.

Setelah warga Madura dievakuasi TNI, pada pertengahan 2001, pemerintah mulai melakukan upaya mediasi dengan kedua etnis tersebut. Pemerintah di sini bertindak sebagai mediator sekaligus fasilitator utama konflik dengan menggunakan pendekatan budaya dan adat untuk menyesuaikan keinginan dari kedua belah etnis dan mencari jalan tengah dari konflik ini [4]. Pemerintah dengan resmi mempertemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tokoh adat serta sesepuh dari etnis Dayak dan Madura untuk membahas kesepakatan antara kedua belah etnis dan pemulangan pengungsi Madura yang sudah dievakuasi keluar dari Kalimantan. Kemudian proses rekonsiliasi ini berlanjut pada tahun 2001-2002, dimana etnis Dayak dan Madura sama-sama sepakat untuk menandatangani perjanjian damai tertulis, yang mana etnis Madura dituntut untuk menghormati pepatah, 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'. Etnis Dayak setuju untuk membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog dengan Madura, sedangkan etnis Madura sendiri juga dituntut untuk menghormati adat istiadat etnis Dayak yang notabene merupakan penduduk asli daerah Kalimantan tersebut. Etnis Dayak juga menuntut agar etnis Madura menghormati kesepakatan tertulis tersebut, karena jika mereka diketahui melanggar perjanjian tersebut, maka etnis Madura akan dianggap tidak menghormati adat Dayak dan harus dituntut ke pengadilan. Oleh karena itu, sebagai tanda simbolisasi perdamaian antar kedua etnis, etnis Dayak dan Madura, bersama-sama dengan pemerintah membangun Tugu Perdamaian Sampit di Kotawaringin Timur sebagai tanda kesepakatan kedua etnis untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Kemudian, pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis, yang bertindak sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan rekonsiliasi, rehabilitasi dan resolusi konflik pada konflik antar-etnis, serta memberikan pengakuan hak dan kedudukan yang setara bagi setiap etnis atau kelompok yang berkonflik. Perda ini penting bagi perdamaian etnis Dayak dan Madura secara berkelanjutan, karena Perda ini mengakui dan melindungi hak-hak politik serta hak sosial-ekonomi kedua belah etnis secara adil [11].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tragedi Sampit merupakan potret kelam kegagalan internalisasi nilai kemajemukan di tingkat akar rumput. Nilai kemanusiaan, toleransi, dan persatuan runtuh ketika perbedaan identitas etnis dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan massal (ethnic cleansing). Konflik ini membongkar kerapuhan integrasi nasional yang selama era Orde Baru hanya dijaga melalui pendekatan keamanan (security approach) yang represif dan superfisial, sehingga menyisakan bom waktu yang meledak saat keran kebebasan era Reformasi terbuka.

Konflik ini tidak bersifat insidental, melainkan puncak dari akumulasi ketegangan laten selama puluhan tahun. Secara sosiologis, dominasi etnis pendatang (Madura) di sektor ekonomi strategis memicu kecemburuan sosial (aspirational deprivation) bagi etnis asli (Dayak) yang merasa termarginalisasi di tanah sendiri. Kebuntuan komunikasi antarbudaya, stereotip negatif, serta lambatnya respons penegak hukum formal menciptakan ketidakpercayaan (distrust) massal. Kondisi yang rentan ini kemudian dieksploitasi oleh aktor intelektual/provokator untuk memobilisasi massa demi kepentingan politik pasca-Reformasi melalui manipulasi informasi dan hoaks.

Pemulihan pascaBikonflik berhasil dicapai melalui kombinasi rekonstruksi kebijakan oleh pemerintah dan rekonsiliasi sakral berbasis kearifan lokal. Integrasi filosofi budaya lokal seperti Huma Betang (kebersamaan) dan Belom Bahadat (hidup beradat), yang dirangkum dalam prinsip "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung", terbukti efektif mengembalikan harmoni sosial. Langkah ini diperkuat secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai payung hukum yang menjamin keadilan politik, sosial, dan ekonomi yang setara bagi semua etnis.

Pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan yang represif dalam meredam gesekan sosial. Setiap kebijakan pemindahan penduduk (transmigrasi) atau pembangunan daerah harus didahului oleh kajian dampak sosiokultural yang mendalam. Pemerintah daerah wajib memastikan adanya distribusi sumber daya ekonomi dan akses politik yang inklusif serta berkeadilan, agar tidak menciptakan kecemburuan struktural antara penduduk asli dan pendatang.

Aparat kepolisian dan lembaga hukum harus bertindak cepat, responsif, tegas, dan imparial (tidak memihak) dalam menangani setiap tindak kriminalitas individu yang melibatkan latar belakang etnis yang

berbeda. Kelambanan penegakan hukum di fase awal terbukti menjadi pintu masuk bagi eskalasi konflik komunal yang lebih besar.

Tokoh adat dari berbagai etnis perlu mengoptimalkan ruang-ruang dialog antarbudaya secara berkala demi mengikis prasangka (prejudice) dan stereotip negatif. Nilai kearifan lokal seperti filosofi Huma Betang harus terus diinternalisasikan kepada generasi muda dan masyarakat pendatang sebagai modal sosial untuk membangun asimilasi dan akulturasi yang sehat.

Mengingat penelitian ini berbasis studi pustaka, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang mendalam untuk memetakan kondisi psikologis lintas generasi, efektivitas jangka panjang dari Tugu Perdamaian Sampit, serta dinamika pembauran sosial-ekonomi kontemporer antara komunitas Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Alexandra, "Analisis Akar Konflik Sampit Melalui Teori Deprivasi," *Global and Policy Journal of International Relations*, vol. 6, no. 2, 2018.
- [2] Ansori, "Kegagalan Komunikasi Antarbudaya Suku Dayak dan Madura pada Konflik Sampit Tahun 2001," *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, vol. 10, no. 2, pp. 82–89, 2023.
- [3] Asnah, S. Sabri, E. Febrianti, and A.-A. Al-Amin, "Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Konvensional dan Syariah," *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 11033–11046, 2023.
- [4] Basit, B. Maftuh, E. Malihah, and N. Mufidah, "Resolusi Konflik Etnis Antara Madura dan Dayak di Sampit melalui Model Sinergi Integratif," *Integristik*, vol. 34, no. 2, pp. 62–68, 2023.
- [5] N. Bisyri, "Konflik Madura-Dayak: Antara Blow Up Sentimen Etnis dan Akar Masalah yang Tertutupi," n.d.
- [6] S. K. E. Fitrah, G. A. Putri, and K. G. Faadihilah, "Kemanusiaan dalam Perspektif Sila ke-3: Analisis Teori Konflik Sosial pada Perang Sampit," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 2, 2025. [Online]. Available: <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/822>
- [7] S. Kirana and G. A. Putri, "Kemanusiaan dalam Perspektif Sila ke-3: Analisis Teori Konflik Sosial pada Perang Sampit," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 2, 2025.
- [8] S. Nadzifah, "Perang Sampit (Konflik Suku Dayak dengan Suku Madura) pada Tahun 2001," *Jurnal Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 23, no. 2, 2022.
- [9] R. Patji, "Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangka Raya (Dari Konflik ke (Re)konstruksi)," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 5, no. 2, pp. 14–34, 2003.
- [10] N. Pursika, "Kajian Analitik Terhadap Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika'," *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 42, no. 1, 2009.
- [11] Suharno, "Kebijakan Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta*, vol. 12, pp. 66–74, 2015.
- [12] D. Suryani, "Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan di Sambas dan Sampit," *Jurnal Penelitian Politik*, 2016, doi: 10.14203/jpp.v9i1.457.
- [13] G. Van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. Routledge, 2007.
- [14] Widen, "Dampak Konflik Sosial Antar Etnis Tahun 2001 terhadap Pola Interaksi Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah," *Jurnal Sosiologi*, 2020, doi: 10.59700/jsos.v4i1.3710.